

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER  
MELALUI KEGIATAN PEMBIASAAN DALAM PENINGKATAN MUTU  
SEKOLAH DI KABUPATEN PINRANG**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER  
MELALUI KEGIATAN PEMBIASAAN DALAM PENINGKATAN MUTU  
SEKOLAH DI KABUPATEN PINRANG**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ilmu Pemerintahan**



**Disusun dan Diajukan Oleh**

**IIS SUEDI**

**Nomor Stambuk : 105641100718**

31/05/2022

1 cap  
Sub. Alami

P40055/1PM/2220  
SUE

i

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Iis Suedi

Nomor Induk Mahasiswa : 105641103418

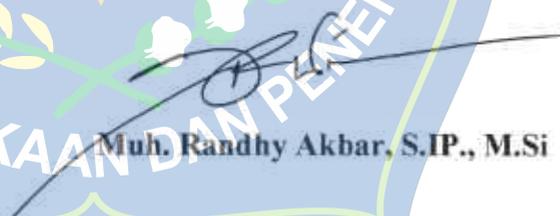
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Pembimbing I

Pembimbing II

 **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si**  **Muh. Randhy Akbar, S.IP., M.Si**

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM. 730 727

  
**Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si**  
NBM. 1031 102

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 035/FSP/A.4-II/V/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 12 Mei 2022.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

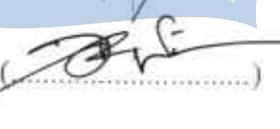
  
Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM : 730727

  
Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM : 992797

Penguji

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi
4. Muh. Randhy Akbar, S.IP., M.Si

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Iis Suedi  
Nomor Stambuk : 105641103418  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 20 April 2022

Yang menyatakan



Iis Suedi

## ABSTRAK

### Iis Suedi, Nuryanti Mustari, Randhy Akbar. Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Kabupaten Pinrang

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Kabupaten Pinrang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan konsep kebijakan public dan pendidikan karakter

Hasil Pembahasan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan 5 teori yaitu (standard dan ukuran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksanaan struktur birokrasi, dan lingkungan ekonomi, social, dan politik) mendapatkan hasil Standar dan Ukuran Kebijakan, penguatan program pendidikan karakter bertujuan untuk membuat siswa lebih kreatif, mandiri, dapat bersosialisasi dengan baik dan disiplin. Kemudian Sumber daya, untuk tercapainya tujuan program pendidikan karakter didukung oleh kapasitas tenaga pengajar yang mempunyai melalui pemberian pelatihan dan bimbingan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di setiap sekolah. Selanjutnya Hubungan antar organisasi, dalam mendukung program pendidikan karakter pelaksanaan program turut melibatkan SKPD diluar dinas pendidikan yang saling bersinergi dalam menciptakan kegiatan yang mendukung implementasi pendidikan karakter. Lalu Karakteristik pelaksana, untuk pelaksanaan program pendidikan karakter setiap struktur yang ada telah dibekali petunjuk berupa standar operasional prosedur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dan yang terakhir Lingkungan, sosial, ekonomi dan politik turut mempengaruhi proses pelaksanaan pendidikan karakter

**Kata kunci:** Kebijakan Publik, Pendidikan Karakter

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Kabupaten Pinrang". Tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi para pembaca secara umum dan secara khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama dan yang paling istimewa penulis persembahkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua, Bapak Edi Sabang dan Ibu Supiani kunnu tercinta berkah doa dan dukungan moral maupun moril, perhatian maupun kasih sayang yang begitu luar biasa tulus tumpah pamrih. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada saudara-saudara penulis kakak sapor, kakak Tia, Adik Reski Suedi dan Adik Supriadi terimakasih banyak sudah menjadi saudara yang hebat untuk penulis.

Serta pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Pembimbing I Ibunda Dr. Nuryanti Mustari S.IP.,M.Si dan pembimbing II Bapak Muh. Randhy Akbar, S.IP, M.Si yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang beserta staf dan jajarannya yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
4. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Kepada Staf Tata usaha atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
6. Terimakasih kepada Segenap keluarga Besar HIMJIP, KMP Unismuh, IPA, dan angkatan 2018 terkhusus ucapan terimakasih kepada Demisioner Peengurus HIMJIP priode 2020-2021.
7. Untuk saudari Cegal Tersayang Iva Sulfiani, Jessica Chyntia, Indah Fajarwati, Dwi Nur Apriandini, Yenny Rahman, Wanda Burti dan Nur Reski. Serta Saudari Miranda terimakasih telah menjadi sahabat dan teman terbaik untuk penulis dimasa yang sulit dan senang.

8. Teruntuk AL dan XI terimakasih banyak sudah menjadi saudara di tanah rantauan sudah menjadi patnert dalam suka dan duka untuk penulis selama ini.
9. Untuk Nadia sukmawati, Nurul fitriana harsaf, Nur Wanda, Sry Reski humuyani, Jumria kamaruddin, Risqi Jannatul, Nurlatifa, khamiranil terimakasih selalu ada untuk penulis disaat penulis membutuhkan.
10. Untuk kakanda ahmad muqtasir muqsit terimakasih juga telah menjadi patnert, teman, dan sahabat yang hebat selama ini.
11. Serta ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memebantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makasssar, 20 April 2022

Yang menyatakan,



Hs Suedi

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kebijakan Publik.....	13
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	21
3. Konsep Pendidikan Karakter.....	23
C. Kerangka Pikir.....	29
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31
<b>BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37

G. Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	40
1. Profil Kabupaten Pinrang.....	40
2. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.....	41
B. Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Pinrang.....	48
1. Standar dan Ukuran Kebijakan.....	49
2. Sumber Daya.....	53
3. Hubungan Antar Organisasi.....	57
4. Karakteristik Pelaksana Struktur Birokrasi.....	60
5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.....	63
C. Pembahasan.....	67
1. Standard an Ukuran Kebijakan.....	67
2. Sumber Daya.....	68
3. Hubungan Antar Organisasi.....	69
4. Karakteristik Pelaksana.....	71
5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan suatu tuntutan reformasi guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang bersih adalah dilakukannya sistem pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Tekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih ini juga telah tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas profesionalisme, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan pasal 3 tersebut dikatakan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa, setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 inilah telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategik yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas.

Pendidikan dianggap sebagai suatu media yang paling jitu dalam mengembangkan potensi anak didik baik berupa keterampilan maupun wawasan. Oleh karena itu, pendidikan secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar dari proses pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan.

Maka perbaikan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan, agar mampu menghasilkan sumber daya yang cerdas, terampil mandiri, dan berakhlak mulia terus diupayakan melalui proses pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional Nomor 20 Pasal 3 tentang sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Putranti & Susanti, 2019)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada Satuan Pendidikan Formal, Pasal 4, Ayat (3) bahwa muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK yang dimaksud pada Ayat (2) diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah. Dalam hal ini, pendidikan karakter diselenggarakan pada lingkup sekolah formal melalui Kurikulum 2013 sebagai Kurikulum Nasional.

Pendidikan karakter merupakan salah satu peran lembaga pendidikan untuk membina generasi muda bangsa agar berperilaku baik dan benar sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk menghasilkan generasi muda berkarakter sebagaimana dicita-citakan bersama maka peran pendidikan bagi anak usia dini sangat penting sebagai peletak dasar pembentukan diri. Sebagian besar pendidik baik guru maupun orang tua kurang menyadari alasan mendasar dari pendidikan karakter usia dini yang juga disebut sebagai usia emas.

Pemberlakuan kebijakan pendidikan dalam kurikulum berbasis karakter didasari oleh penghayatan bahwa pendidikan karakter perlu diberikan di semua jenjang pendidikan. Situasi lain yang juga turut mendorong pemberlakuan kurikulum berbasis karakter ialah adanya degradasi moral bangsa dimulai dari perilaku para pemimpin bangsa, para wakil rakyat sampai ke lapisan masyarakat.

KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat 1 dan 2. Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum 2004, adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004 walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari Kurikulum 1994, perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas.

Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem caturwulan. Sedangkan dalam kurikulum baru ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Dahulu pun, para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan IPTEK tanpa meninggalkan kerja sama dan solidaritas, meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetisi. Jadi di sini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi meski begitu pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di kelas, para siswa

bukan lagi objek, tetapi subjek. Dan setiap kegiatan siswa ada nilainya. mulai diberlakukan pula wajib pramuka sebagai nilai tambah ekstrakurikuler.

Ditinjau dari signifikansinya, kurikulum dinyatakan sebagai salah satu unsur yang memberikan kontribusi paling signifikan dalam mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik (Siadari, 2018). Kurikulum 2013 (K13) merupakan Kurikulum Nasional (KurNas) yang saat ini sedang diimplementasikan ke seluruh penjuru Indonesia pada tingkat Sekolah Dasar (SD/MI, Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), hingga Sekolah Menengah Atas(SMA/MA).Nilai-nilai yang berusaha ditanamkan melalui pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan melalui Kurikulum 2013 yang telah teridentifikasi terdapat 18 (delapan belas) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional yang dipaparkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter (2011: 8) dapat dilihat sebagai berikut: 1) Religius, 2) Jujur, 3) Toleransi,4)Disiplin, 5) Kerja keras, 6) Kreatif, 7) Mandiri, 8) Demokratis, 9) Rasa Ingin Tahu, 10) Semangat Kebangsaan, 11) Cinta Tanah Air, 12) Menghargai Prestasi, 13) Bersahabat/Komunikatif, 14) Cinta Damai, 15) Gemar Membaca, 16) Peduli Lingkungan, 17) Peduli Sosial, 18) Tanggung Jawab (Wadud, 2019).

Hal yang sangat menarik untuk dicermati bahwa pada awal abad ke-21 ini, hanya dalam rentang waktu kurang dari 10 tahun, pemerintah Indonesia telah melahirkan sedikitnya dua kurikulum. Pertama, Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK) tahun 2004, kedua Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Artinya hanya selang dua tahun saja, kurikulum yang menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan telah berubah. Pada abad 20-an kurikulum berganti menyesuaikan perkembangan zaman, biasanya setiap rentang waktu sepuluh tahun. Namun pada abad ke-21 seperti telah disebutkan, belum genap lima tahun pemerintah sudah melahirkan dua kurikulum. Tujuh tahun kemudian pemerintah menggagas kurikulum baru, yang kini dinamakan kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Pendidikan karakter merupakan salah satu peran lembaga pendidikan untuk membina generasi muda bangsa agar berperilaku baik dan benar sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk menghasilkan generasi muda berkarakter sebagaimana dicita-citakan bersama maka peran pendidikan bagi anak usia dini sangat penting sebagai peletak dasar pembentukan diri. Sebagian besar pendidik baik guru maupun orang tua kurang menyadari alasan mendasar dari pendidikan karakter usia dini yang juga disebut sebagai usia emas (*the golden age*).

Dalam proses pendidikan di sekolah, siswa tidak selalu mendapatkan lingkungan sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangannya. Di

sekolah seringkali muatan kurikulumnya terlalu berat dan pembelajaran yang konvensional. Lingkungan sekolah seperti ini dapat menimbulkan kesulitan bagi siswa untuk beradaptasi dengan beban kurikulumnya dan pendekatan pembelajarannya sehingga tidak tumbuh optimal, bahkan seringkali prestasinya rendah

Pelaksanaan pendidikan karakter di Kabupaten Pinrang diintegrasikan ke Dalam proses pembelajaran dilakukan berdasarkan metode yang sejalan dengan kurikulum 2013. Adanya urgensi dalam pengembangan nilai-nilai karakter, khususnya nilai karakter mandiri, bersahabat/komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan serta nilai karakter tanggung jawab pada siswa sekolah yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam Kurikulum 2013 pada seluruh Sekolah di Indonesia mengakibatkan timbulnya suatu kebutuhan akan pelaksanaan tinjauan atas implementasi dari pendidikan karakter pada Kurikulum 2013 tersebut. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada proses pembelajarannya sejak tahun 2015. Keberadaan Kabupaten Pinrang yang berada di ujung sebelah Barat Sulawesi Selatan juga dituntut untuk memberikan pendidikan karakter dari usia dini kepada siswa-siwi dari kebiasaan Pembiasaan untuk meningkatkan mutu sekolah di Kabupaten Pinrang.

## B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana implementasi program penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan dalam peningkatan mutu sekolah di Kabupaten Pinrang?

## C. TUJUAN PENULISAN

Mengetahui implementasi program penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan dalam peningkatan mutu sekolah di Kabupaten Pinrang

## D. MANFAAT PENULISAN

1. Secara teoritis
  - a. Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah.
  - b. Memberikan masukan terhadap penanganan implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Kabupaten Pinrang.
2. Secara praktis
  - a. Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
  - b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Muhammad Zul Ahmadi (2020).	Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter di SMPN 3 Bontomarannu sudah berjalan namun pelaksanaannya belum maksimal. (ii) Faktor pendukung dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter di SMPN 3 Bontomarannu adalah adanya

			<p>kompetensi guru, kerjasama yang baik dari wali peserta didik, kurikulum sekolah yang sudah baik, serta pengawasan intens dari kepala sekolah. (iii) Faktor penghambat dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter di SMPN 3 Bontomarannu adalah sarana dan prasarana, kualifikasi akademik guru yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, adanya karakter yang berbeda-beda pada peserta didik serta kedisiplinan peserta didik yang masih rendah.</p>
2.	Yustina Dini Putrant (2019).	Program Penguatan Pendidikan Karakter	Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru

		<p>berbasis kelas di sekolah dasar negeri se-Kecamatan Sleman</p>	<p>kelas sudah menerapkan program Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas dengan memperhatikan 3 aspek. Pada aspek sosialisasi sudah diterapkan sebesar 83,75%, aspek pra observasi sebesar 97%, dan aspek observasi kelas sebesar 96,71%. Hal itu ditunjukkan dengan guru yang sudah mendapatkan informasi PPK, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, mengawali doa sebelum memulai pelajaran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib, dan lagu daerah pada awal dan akhir pelajaran, menyisipkan nilai karakter pada RPP,</p>
--	--	---	---

			<p>menggunakan metode pembelajaran yang tepat, dan memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang karakter yang dituangkan dalam RPP.</p>
3.	<p>Elsy Senides Hana Taunu (2019).</p>	<p>Evalusi pogram penguatan pendidikan karakter terintegrasi mata pelajaran matematika di SMP negeri.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan program pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Waingapu belum optimal, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi; 2) pengaruh program pengintegrasian nilai karakter dalam Matematika positif terhadap prestasi dan perilaku siswa tetapi juga negatif terhadap beban kerja guru; 3) faktor-faktor yang mempengaruhi program adalah: sarana dan prasarana,</p>

			akses informasi, guru, siswa
--	--	--	------------------------------

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini pada :

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah. Adalah penelitian ini membahas mengenai implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar. Sementara penelitian sebelumnya berfokus kepada sekolah menengah atas.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Program Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas di sekolah dasar negeri Se-Kecamatan Sleman. Adalah penelitian ini membahas mengenai pengimplementasian pendidikan karakter di sekolah dan lebih melihat kepada peran pemerintah dalam program pendidikan karakter.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Evaluasi pogram penguatan pendidikan karakter terintegrasi mata pelajaran matematika di SMP negeri. Adalah penelitian ini membahas mengenai pembiasaan dalam peningkatan mutu sekolah.

## B. KERANGKATEORI

### 1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Adapun kebijakan publik yang merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut David Easton kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat (Anggara, 2014).

Sedangkan pengertian kebijakan publik atau negara didefinisikan berbeda oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Dye dalam (Muadi, 2016), bahwa kebijakan negara sebagai "*is whatever government choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut Dye, mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah. Selanjutnya, kebijakan memiliki dua aspek (Haning, 2018)

yaitu:

1. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagimasyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas lindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersamatersebut.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Muadi et al., 2016). Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan

disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas dalam (Muadi, 2016), menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi masalah
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan *good governance*, maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/ dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi sebagai berikut :

#### 1. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.

#### 2. Transparansi

Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu

dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti.

### 3. Akuntabilitas

Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### 4. Keadilan

Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

### 5. Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat di samping menopang percepatan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi

masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik, karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

#### 6. Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

#### 7. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya. Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai kebijakan publik, maka dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah. Dalam hal ini tindakan pemerintah untuk merespon permasalahan yang ada, juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan yang dicita-citakan bersama (Herdiana, 2018).

Dalam pelaksanaan kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Menurut Dunn ada 6 indikator evaluasi kebijakan yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan.

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat, itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Susanto & Sujianto, 2017).

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan (FIO, 2021).

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Amjah et al., 2022).

Menurut Purwanto, beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu (WAHIB, 2020):

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan. Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Affandi, 2020).

Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan (Putra et al., 2021).

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan publik, suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak agar tujuan yang diinginkan tercapai. Secara garis besar, implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan

fakta yang telah terjadi dengan menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan (Akib, 2010).

Terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni (Subekti et al., 2017):

1. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang

ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

### 3. Konsep Pendidikan Karakter

Pendidikan juga memiliki definisi secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan terprogram guna membangun personalitas yang baik dan mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada diri individu manusia agar mencapai tujuan atau target tertentu dalam menjalani hidup.

Karakter adalah gabungan dari beberapa psikologis karakter

berupa nilai moral, tindakan moral, kepribadian, emosi, nalar dan karakteristik individu yang mempengaruhi setiap tindakan seseorang sebagai agen moral. Menurut Lorens, karakter dapat didefinisikan sebagai ciri khas masing-masing individu yang meliputi tingkah laku, kebiasaan, kegemaran, ketidaksukaan, kapasitas, ketrampilan, kekuatan, nilai-nilai dan gagasan atau ide-ide sebagai pembeda antara individu satu dengan yang lain. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah sikap dan tingkah laku manusia yang terwujud dalam tindakan, ucapan maupun pikiran dan menjadi ciri khas pembeda masing-masing individu (Jumiyem, 2021).

Pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan (Suwito, 2012).

Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang bermoral, berkepribadian yang baik, berakhlak dan bermartabat melalui sistem pendidikan. Pendidikan karakter dapat mendorong dan mewujudkan perbaikan diri individu secara berlanjut atau berkesinambungan dan mengasah keahlian diri individu guna

mencapai tujuan hidup yang lebih baik (Agung Prasetiyo & Muthali'in, 2019).

Pendidikan karakter dapat disimpulkan sebagai pendidikan untuk membentuk kepribadian moral, akhlak dan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter Pancasila. Strategi pendidikan karakter. Menurut Amri, Jauhari dan Elisah sebagaimana dikutip oleh (Ramdhani 2014: 33), strategi pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu (Agung Prasetiyo & Muthali'in, 2019):

- a. Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang diberikan kepada peserta didik dengan menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai sosial melalui keteladanan, pergaulan sikap positif dan negatif, eksperimen, tindakan sosial dan simulasi.
- b. Pendekatan perkembangan kognitif adalah pendekatan yang mendorong dan melatih peserta didik untuk berpikir aktif dan kreatif dalam memecahkan, mencari solusi dan dapat bertanggungjawab pada keputusan yang diambil terhadap masalah atau persoalan-persoalan nilai moral yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pendekatan klarifikasi nilai adalah pendekatan yang dilakukan untuk membantu peserta didik dalam merefleksikan segala perasaan dan tindakan yang kemudian dapat menjadikan peserta didik sadar akan nilai-nilai moral.

- d. Pendekatan pembelajaran tersebut adalah pendekatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan atau sarana pada peserta didik secara individu atau berkelompok untuk melakukan tindakan moral

Menurut Kurniawan (2017: 41-42), nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia berasal dari empat sumber, yaitu agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional (Agung Prasetyo & Muthali'in, 2019). Berdasarkan keempat sumber tersebut, teridentifikasi nilai untuk pendidikan karakter sebagai berikut:

- 1) Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agamalain.
- 2) Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- 3) Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda daridirinya.
- 4) Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh

pada berbagai ketentuan dan peraturan.

- 5) Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kreatif adalah berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
- 7) Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- 8) Demokratis adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- 9) Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
- 10) Semangat kebangsaan adalah cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.
- 11) Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
- 12) Komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan oranglain.

- 13) Cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirandirinya
- 14) Gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagidirinya.
- 15) Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudahterjadi.
- 16) Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yangmembutuhkan.
- 17) Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang MahaEsa.

Pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan. Pendidikan karakter mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dengan pendidikan budi perkerti. Hal ini ditunjukkan dengan ruang lingkup pelaksanaan yang tidak terbatas pada proses pembelajaran (Al Musafiri, 2017).

Sebagai kesimpulan bahwa pendidikan karakter adalah upaya terencana menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasikan nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Dengan adanya pendidikan karakter diharapkan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang.

### C. KERANGKA PIKIR

Pada dasarnya pendidikan formal di sekolah akan sangat membantu jika pihak sekolah menekankan pada pendidikan yang membentuk karakter anak. Seiring dengan lunturnya nilai moral di masyarakat saat ini membuat sekolah harus dapat meningkatkan mutu pendidikannya dan memperbanyak program pendidikan karakter. Menurut Hamid (2017:3) "Sekolah (pendidikan) merupakan salah satu tempat yang strategis dalam pembentukan karakter selain di keluarga dan masyarakat". Hal itulah yang mendasari perlu adanya program pendidikan karakter di sebuah sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka dari itu perlu penanaman pendidikan karakter untuk tiap sekolah dengan berbagai kegiatan yang bisa menunjang penanaman karakter yang baik ini.

Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menguatkan dan menanamkan nilai-nilai karakter adalah dengan kegiatan pembiasaan yang dilakukan disekolah. Karena memang hal yang rutin dilakukan setiap hari akan

tertanam dengan baik dalam diri peserta didik maupun warga sekolah yang lain. Maka dari itu kegiatan pembiasaan ini menjadi kegiatan yang sangat penting bagi terlaksananya pendidikan karakter yang ada disekolah.

Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang menjadi acuan penelitian yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan, disusun dalam bentuk matrik, bagan atau gambar (Harahap, 2019).

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

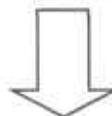
Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Di kabupaten Pinrang



Indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi

(Meier dan Horn dalam Sobarsono:2010)

1. Standar dan ukuran kebijakan
2. SumberDaya
3. Hubungan antarorganisasi
4. Karakteristik pelaksanaan strukturBirokrasi
5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, danPolitik



Terwujudnya Program Penguatan Pendidikan  
Karakter di Kabupaten Pinrang

#### D. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian ini yaitu Standar dan ukuran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik.

#### E. DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN

1. Standar dan Ukuran Kebijakan, dalam penelitian ini program tentang Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Kabupaten Pinrang perlu melihat variabel sasaran dan dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Dimana proses implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang tersedia.
3. Hubungan antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu diperlukannya koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi.
4. Karakteristik pelaksanaan struktur Birokrasi mengetahui berapa banyak

pihak yang dilibatkan dalam kegiatan penguatan karakter tersebut lalu bagaimana karakteristik implementor dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana apakah sesuai dengan bidangnya/ apakah sesuai dengan harapan masyarakat terhadap penguatan karakter melalui kegiatan pembiasaan.

5. Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik mencakup sumber daya ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, seberapa besar dan bagaimana program penguatan karakter melalui program pembiasaan tersebut dapat mempengaruhi kondisi Pendidikan sosial yang ada, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang dibuat.



### BAB III

#### METEDOLOGI PENELITIAN

##### A. WAKTU DAN LOKASIPENELITIAN

Waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang dengan judul Implementasi program penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan dalam peningkatan sekolah di Kabupaten Pinrang dan dilakukan selama 2 bulan lamanya. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi sumber informasi dan pengambilan data yang dapat mendukung penelitian.

##### B. JENIS DAN TIPE PENELITIAN

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Kabupaten Pinrang adalah:

###### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan (Sugiyono, 2016). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan merekadan

berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

## 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti yaitu Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Modal Sosial Untuk ketertahanan Masyarakat yang terdiri dari peran alokasi sumber daya, peran regulator, dan peran kesejahteraan sosial. Dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi.

## C. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini dijangkau dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

#### D. INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Informan penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dimana metode tersebut merupakan salah satu teknik nonprobability sampling yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode tersebut adalah mengambil sampel yang dapat mewakili perspektif lebih luas dari kriteria, yang sudah ditetapkan sebelumnya dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Adapun informan dari penelitian terkait Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Budaya	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
Nurheni	Seksi Peserta didik dan Pengembangan Karakter
Mustari,	Kepala Sekolah UPT SDN 1 Pinrang
Muh.Nasir,	Kepala Sekolah SD ISLAM AL-INSAN
Andi Samsiah	Guru
Lina	Orang Tua Siswa
Rahma	Orang Tua Siswa

## E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data

atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

## F. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2011). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan teras bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

## 3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

## G. KEABSAHANDATA

Menurut (Sugiyono, 2016), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang

dianggap benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

### 3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Profil Kabupaten Pinrang

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebanyak 372.230 jiwa yang terdiri dari 180.586 jiwa penduduk laki-laki dan 191.644 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebesar 55.972 jiwa Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin Kabupaten Pinrang tahun 2020 sebesar 94,2. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Pinrang

No.	Kecamatan	Luas (KM <sup>2</sup> )	Kelurahan	Desa
1.	Suppa	74.2	2	8
2.	Mattiro Sompe	96.99	2	7
3.	Lanrisang	73.01	1	6
4.	Mattiro Bulu	132.49	2	7
5.	Watang sawitto	58.97	8	-
6.	Paleteang	37.29	6	-
7.	Tiroang	77.73	5	-
8.	Patampanua	136.85	4	7
9.	Cempa	90.3	1	6

10.	Duampanua	291.86	5	10
11.	Batulappa	158.99	1	4
12.	Lembang	733.09	2	14
Total		1961.77	39	69

(Sumber: Kabupaten Pinrang dalam Angka 2020)

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sekitar 189,7 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sekitar 1.076 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu sekitar 54 jiwa/km.

## 2. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan telah membuat terobosan baru dalam pendidikan untuk membentuk karakter siswa dengan cara mewacanakan program *full day school*. Sistem *full day school* untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta, dengan sistem *full day school* ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja.

Pendidikan karakter berusaha menanamkan berbagai kebiasaan-kebiasaan baik kepada siswa agar bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Mengenai tindakan yang dianggap

baik ataupun buruk,terdapat delapan belas nilai karakter yang dikembangkan dalam pendidikan karakter yang terdiri dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cintai damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang sebagaimana yangtercantum pada PERDA No. 19 Tahun 2008 yaitu melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaanberdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan
- c. Membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- d. Mengelola administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.

- e. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pembangunan pendidikan di Kab.Pinrang didesain dalam rangka memenuhi harapan dan target yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang dimaksud termasuk dokumen perencanaan terkait antara lain RPJM Dacrah Kab.Pinrang, Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, motivatif serta produktif. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang adalah :“Terwujudnya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas guna terciptanya masyarakat cerdas dan sejahtera”. Strategi memajukan pendidikan yang dimaksud dalam Visi yaitu strategi dengan proses dan mekanisme yang memberikan peluang besar kepada masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan sumber daya manusia.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan instansi pemerintah sesuai Visi yang telah ditetapkan agar organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara dan berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. Mewujudkan kualitas/mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal.
- c. Mewujudkan dukungan sustainability (berkelanjutan) lulusan anak didik sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas dengan mengembangkannya nyata pembangunan fasilitas pendidikan baru yang variatif dan kreatif.
- d. Mewujudkan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur.
- e. Mewujudkan kreatifitas, daya saing dan prestasi dibidang Seni dan Budaya.
- f. Mewujudkan tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan layanan prima pendidikan.

Berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD Tahun 2018 terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu :

- a. Mewujudkan Peningkatan Angka Partisipasi Anak Usia Dini
- b. Mewujudkan Peningkatan Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan(9) Tahun
- c. Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu dan Kompetitif
- d. Mewujudkan Tenaga Pendidik yang Bermutu dan Kompetitif
- e. Mewujudkan Peningkatan SDM Penduduk melalui Pendidikan Non Formal, dan Peningkatan Angka Rata-rata lama sekolah
- f. Mewujudkan peningkatan dalam upaya pengelolaan dan pelestarian Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya
- g. Mewujudkan Sistem Tata Kelola dan Nilai Sumber daya aparatur dengan baik.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - 1) Subag Keuangan
  - 2) Subag Umum
  - 3) Subag Perencanaan
- c. Bidang Pendidikan Dasar
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - 2) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana
  - 3) Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter

- 
- d. Bidang Pembinaan Ketenagaan
- 1) Seksi PTK Paud dan Dikmas
  - 2) Seksi PTK Pendidikan Dasar
  - 3) Seksi Tenaga Kebudayaan
- e. Bidang Kebudayaan
- 1) Seksi Cagar Budaya dan Museum
  - 2) Seksi Sejarah dan Tradisi
  - 3) Seksi Kesenian
- f. Bidang Pendidikan PAUD dan Dikmas
- 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - 2) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana
  - 3) Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 12 UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas dan Penilik ).

Pada penelitian ini penulis membatasi lokasi penelitian di kecamatan

Watang Sawitto. Adapun sekolah dasar yang terdapat pada kecamatan tersebut yaitu:

Tabel 4.2 Jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Watang Sawitto

No.	Sekolah	Status Sekolah
1.	UPT SDN 1 Pinrang	Negeri
2.	UPT SDN 3 Pinrang	Negeri
3.	UPT SDN 4 Pinrang	Negeri
4.	UPT SDN 5 Pinrang	Negeri
5.	UPT SDN 6 Pinrang	Negeri
6.	UPT SDN 8 Pinrang	Negeri
7.	UPT SDN 9 Pinrang	Negeri
8.	UPT SDN 12 Pinrang	Negeri
9.	UPT SDN 16 Pinrang	Negeri
10.	UPT SDN 20 Pinrang	Negeri
11.	UPT SDN 21 Pinrang	Negeri
12.	UPT SDN 22 Pinrang	Negeri
13.	UPT SDN 23 Pinrang	Negeri
14.	UPT SDN 161 Pinrang	Negeri
15.	UPT SDN 174 Pinrang	Negeri
16.	UPT SDN 187 Pinrang	Negeri
17.	UPT SDN 212 Pinrang	Negeri
18.	UPT SDN 213 Pinrang	Negeri
19.	UPT SDN 244 Pinrang	Negeri
20.	UPT SDN 245 Pinrang	Negeri
21.	UPT SDN 249 Pinrang	Negeri
22.	UPT SDN 250 Pinrang	Negeri
23.	UPT SDN 285 Pinrang	Negeri
24.	UPT SDN 286 Pinrang	Negeri
25.	UPT SDN 287 Pinrang	Negeri
26.	UPT SDN Inpres Betingkat	Negeri

27.	UPT SDN Inpres Garessi	Negeri
28.	UPT SDN Inpres Bentenge	Negeri
29.	UPT SDN Inpres Ulutedong	Negeri
30.	SD Muhammadiyah 2 Pinrang	Swasta
31.	SD Islam Al-Qadri	Swasta
32.	SD Islam Al-Insan	Swasta

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang 2022)

Dari tabel 4.2 dapat dilihat terdapat 32 sekolah dasar di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dimana terdapat 29 sekolah berstatus negeri dan 3 sekolah berstatus swasta. Dari data yang didapatkan dilokasi penelitian UPT SDN I Pinrang merupakan sekolah unggulan karena telah memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Prestasi akademik dan non akademik di atas rata-rata sekolah yang ada di daerahnya.
- 2) Sarana dan prasarana dan layanan yang lebih lengkap.
- 3) Melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap pendaftar.
- 4) Mendapat animo yang besar dari masyarakat, yang dibuktikan banyaknya jumlah pendaftar dibanding dengan kapasitas kelas
- 5) Guru yang professional
- 6) Kurikulum yang inovatif.
- 7) Ruang kelas atau pembelajaran yang representatif.

## **B. Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Pinrang**

Pendidikan karakter merupakan salah satu peran lembaga pendidikan untuk membina generasi muda bangsa agar berperilaku baik dan benar sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk menghasilkan generasi muda berkarakter sebagaimana dicita-citakan bersama maka peran pendidikan bagi anak usia dini sangat penting sebagai peletak dasar pembentukan diri. Sebagian besar pendidik baik guru maupun orang tua kurang menyadari alasan mendasar dari pendidikan karakter usia dini yang juga disebut sebagai usia emas.

Permendikbud No. 20 Tahun 2018 Penguatan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan formal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden NO. 87 Tahun 2017 Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Peraturan tersebut menjadi dasar Kabupaten Pinrang membuat Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter.

Hasil observasi awal penulis pendidikan karakter di Kabupaten Pinrang belum merata disemua sekolah, namun setelah melakukan penelitian pendidikan karakter tersebut merata di semua sekolah hanya saja dalam pengimplementasian yang berbentuk program di setiap sekolah berbeda.

Kebijakan pendidikan di Kabupaten Pinrang sesuai dengan kurikulum 2013 mengarahkan kepada setiap UPT sekolah-sekolah untuk terus

melakukan pembinaan terhadap siswa melalui peningkatan karakter dengan berfokus kepada pendekatan afektif, psikomotrik dan kognitif. Untuk itu melalui penelitian ini penulis ingin melihat bentuk pengaplikasian program pendidikan karakter melalui pendekatan indikator standar dan ukuran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana serta lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang akan dibahas sebagai berikut:

#### **1. Standar dan Ukuran Kebijakan**

Standar dan ukuran kebijakan adalah hasil yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan biasanya dibuat sebagai langkah awal dalam pembuatan suatu rencana kegiatan atau program. Dalam suatu kegiatan dibutuhkan juga tujuan sebagai salah satu komponennya. Kebijakan pendidikan yang akan diimplementasikan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam kebijakan pendidikan juga harus rasional dan dapat diterima oleh semua pihak.

Program pendidikan karakter di Kabupaten Pinrang terdapat 5 point penting salah satunya menjadikan siswa lebih mandiri dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Siswa diberikan pelatihan-pelatihan dalam bentuk ujian untuk melihat potensi masing-masing siswa.

“Ada beberapa point penting yang perlu diperhatikan dalam membangun karakter siswa, salah satunya kemandirian. Melalui program ini siswa diharapkan dapat belajar untuk dapat menyelesaikan segala persoalannya sendiri. Contoh yang sangat sederhana misalnya mereka tidak menyontek ketika diberikan tugas. Jadi perlu ditekankan bahwa setiap siswa itu memiliki potensinya masing-masing itu yang perlu digali oleh tenaga pendidik. Kemudian memotivasi siswa untuk senantiasa berbuat sesuai kemampuan dan tidak terus bergantung dengan orang lain.” (Wawancara

dengan Budaya 5 April 2022).

Meningkatkan kemandirian siswa melalui pemberian motivasi membuat pelajar lebih percaya diri dalam menyelesaikan segala persoalan terutama menyangkut mata pelajaran disekolah. Hal tersebut jika berjalan dengan baik diharapkan dapat membentuk siswa yang lebih mandiri dan tidak terus bergantung terhadap orang lain.

Lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar tidak hanya memperhatikan kemampuan kognitif dan psikomotor, namun juga mengembangkan sikap mental/kepribadian yang paripurna atau berakhlak mulia. Kegiatan pendidikan merupakan proses yang memiliki konsistensi, intensitas, dan berkesinambungan agar proses transformasi ilmu menjadi tuntas sesuai dengan tujuan.

“Program pendidikan karakter ini tidak hanya berfokus pada pemberian ilmu pengetahuan tapi lebih condong kepada pembentukan kepribadian siswa disekolah. Untuk itu sekolah dituntut untuk lebih meningkatkan kebiasaan siswa seperti membuang sampah pada tempatnya, mengajarkan disiplin, senantiasa membaca doa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Program-program tersebut nantinya akan menjadi pembentuk karakter bagi siswa disekolah.” (Wawancara dengan Nurheni 5 April 2022).

Sasaran kebijakan pengembangan pendidikan karakter lebih kepada membudayakan sikap disiplin disekolah yang akan menjadi kebiasaan dari siswa sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun perlu memiliki kepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa dan agama.

Pendidikan karakter di sekolah yang diimplementasikan pada pendidikan pengembangan diri antara lain; melalui kegiatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, semisal pengurus OSIS, Pramuka, PMR, PKS, KIR, Olahraga, Seni, Keagamaan dan lainnya. Dengan kegiatan ekstrakurikuler ini sangat menyentuh, mudah dipahami, dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran minat dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran minat dan bakat yang dapat dikembangkan sebagai perwujudan pendidikan karakter bangsa.

Upaya membentuk karakter siswa dilakukan oleh SDN 1 Pinrang melalui penyaluran minat dan bakat siswa dengan melibatkan siswanya untuk memilih organisasi sesuai dengan keinginan siswa. Pengembangan karakter siswa melalui pendekatan ekstrakurikuler mempercepat proses peningkatan siswa akan segala sesuatu dan tidak monoton mendapatkan pengetahuan hanya didalam kelas.

“Peningkatan karakter siswa disekolah kami dengan mendorong partisipasi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan keinginan siswa ada pramuka, PMR, dan beberapa cabang olahraga. Harapan kami kemudian dengan terlibatnya siswa di kegiatan tersebut lebih membentuk kerjasama diantara mereka, lebih komunikatif dan menghilangkan stres siswa karena belajar sehari-hari.”(Wawancara dengan Mustari 7 April 2022).

Mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pembentukan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan disekolah. Selain membentuk kreatifitas siswa juga diharapkan dapat membangun semangat persatuan sebagai bekal siswa ketika terjun dimasyarakat.

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun bathin dari sifat qadratinya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik lagi. Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan formal, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, hormat kepada orang lain, dan nilai-nilai karakter mulia lainnya.

Pelaksanaan pendidikan karakter di Kabupaten Pinrang juga turut mengikutsertakan partisipasi dari orang tua siswa. Program tersebut dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap orang tua siswa agar lebih memahami kurikulum terbaru yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Kebijakan tersebut juga turut mendapatkan respon yang positif dari orang tua siswa.

“Sebelumnya itu ada sosialisasi kepada orang tua bahwa disekolah sekarang diterapkan pendidikan karakter melalui kegiatan-kegiatan tambahan yang dilakukan disekolah. Bagi saya selama itu positif tentu akan didukung oleh orang tua. Lebih baik anak saya ikut kegiatan-kegiatan pramuka dari pada dirumah hanya bermain hp.”(Wawancara dengan Lina 7 April 2022).

Keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler disekolah memberikan dampak positif terhadap pengembangan siswa. Hal tersebut juga mengurangi waktu siswa yang terbuang sia-sia dengan hanya

cenderung bermain game dirumah.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dalam melihat standar dan ukuran kebijakan pada proses implementasi program penguatan pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa pada proses pengembangan karakter. Melalui beberapa kegiatan yang dilakukan disekolah menjadikan siswa lebih kreatif, mandiri, dapat bersosialisasi dengan baik, disiplin. Setiap sekolah diharuskan membukakan ruang bagi setiap pelajar untuk mengembangkan kreatifitasnya melalui kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Sehingga melalui kegiatan tersebut setiap guru dapat mengenali dan meningkatkan potensi dari setiap masing-masing siswa.

## 2. Sumber daya

Tenaga kependidikan merupakan suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Salah satu unsur tenaga kependidikan adalah tenaga pendidik/ tenaga pengajar yang tugas utamanya adalah mengajar.

Program pendidikan karakter di Kabupaten Pinrang perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk tenaga pendidik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengembangan tenaga pendidik melalui kegiatan-kegiatan diklat.

“Setiap SDM yang ada disekolah mulai dari kepala sekolah, guru, sampai staff TU itu dilakukan pembinaan melalui diklat yang dilakukan oleh dinas

pendidikan. Jadi ada semacam bimbingan teknis untuk para tenaga pendidik ini, setiap guru diarahkan bagaimana menjalankan perannya masing-masing disekolah dalam mendukung pendidikan karakter. Selain itu ada standar-standar yang sudah kami tetapkan dan itu menjadi garis haluan bagi setiap tenaga pendidik dalam memberikan pelajaran disekolah.”(Wawancara dengan Budaya 5 April 2022).

Pengembangan tenaga pengajar atau guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan dalam rangka mendukung pendidikan karakter perlu diarahkan agar dapat menjalankan perannya masing-masing dalam melakukan kegiatan pembelajaran disekolah. Setiap tenaga pengajar juga harus memiliki standar operasional yang jelas.

Sebagai seorang mentor, guru harus dapat memberikan instruksi moral dan bimbingan melalui penjelasan, diskusi di kelas, bercerita, pemberian motivasi personal, dan memberikan umpan balik yang korektif ketika ada siswa yang menyakiti temannya atau dirinya sendiri.

“Disini penting untuk melakukan upgrade terhadap guru melalui pelatihan-pelatihan. Pendidikan karakter ditingkat sekolah tidak hanya dilakukan dengan pemberian pembelajaran tapi guru harus mampu menanamkan motivasi kepada siswa. Sehingga melalui pelatihan tersebut guru diharapkan dapat berimprovisasi disekolah untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan karakter.” (Wawancara dengan Nurheni 5 April 2022).

Seorang guru yang profesional memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berkarakter secara utuh dan berpusat pada perkembangan sikap, kepribadian, potensi dan kebutuhan peserta didik. Guru yang memiliki kompetensi profesional mampu mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam materi pembelajaran dengan baik.

Kompetensi pribadi seorang guru harus mempunyai pengetahuan

menunjang tentang kondisi psikologis, dan pedagogis dari peserta didik yang dihadapinya, beberapa komponen pribadi yang semestinya ada pada seorang guru yaitu memiliki pengetahuan yang dalam tentang materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Setiap guru harus dapat memaparkan setiap pelajaran yang disampaikan kepada siswa. Dalam proses tersebut tenaga pendidik diharapkan memberikan penyampaian secara baik dan sederhana agar mudah bagi para siswa dalam menerima mata pelajaran disekolah.

“Kami dibimbing terkait bagaimana melihat kondisi psikologis siswa saat mata pelajaran berlangsung, apa lagi kalau siang hari kebanyakan dari siswa ini mengantuk. Jadi sebelum belajar para guru biasanya melakukan games sederhana untuk kembali membuat siswa lebih bersemangat dalam menerima pelajaran. Kalau untuk penyampaian bahan ajaran terhadap siswa sendiri para guru lebih ditekankan untuk menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah bagi para siswa dalam menerima pesan yang disampaikan guru. Intinya setiap guru punya pendekatan masing-masing dalam menyampaikan bahan ajaran terhadap siswanya.” (Wawancara dengan Samsiah 7 April 2022).

Setiap guru mempunyai peranan penting dalam memberikan materi kepada siswa sehingga para siswa dapat menerima materi dengan baik. Selain itu tenaga pendidik diharuskan selalu memperhatikan kondisi siswa agar lebih mudah dalam menerima mata pelajaran yang diberikan.

Manajemen pendidikan merupakan manajemen kelembagaan yang bertujuan untuk menunjang perkembangan dan penyelenggaraan pengajaran dan pembelajaran di sekolah/madrasah. Manajemen pendidikan dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi. Proses pendidikan akan berhenti total apabila salah satu komponen tersebut tidak ada. Komponen

yang dimaksud adalah manajemen kesiswaan, manajemen ketenagaan dan sumber daya manusia, manajemen kelas, manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat agar tujuan pendidikan bisa tercapai.

Sarana dan prasarana di sekolah Kabupaten Pinrang dituntut untuk memperbaiki kualitas perpustakaan sebagai tempat bagi siswa dalam memperbanyak literasi. Ketersediaan perpustakaan di sekolah juga mengurangi beban biaya dari orang tua siswa dalam melengkapi seluruh kebutuhan seperti buku pelajaran bagi pelajar.

“Sekarang ini sudah bagus anak-anak tidak lagi perlu membeli buku karena sudah ada perpustakaan yang menyediakan buku-buku kebutuhan pelajaran. Ini tentu mengurangi beban orang tua siswa, tidak seperti dahulu kita harus beli buku seperti di Gramedia. Belum lagi sekarang sudah ada internet jadi memudahkan siswa untuk mencari bahan pelajaran.” (Wawancara dengan Rahma 7 April 2022).

Perpustakaan pada dasarnya merupakan sarana bagi siswa dalam menimba ilmu melalui buku-buku bacaan. Selain itu kehadiran perpustakaan memudahkan para siswa untuk mendapatkan referensi dari setiap tugas-tugas sekolah yang diberikan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait sumber daya pada proses implementasi program penguatan pendidikan karakter dimana setiap tenaga pendidik di sekolah diberikan pelatihan kompetensi agar mampu melaksanakan pola pendidikan karakter sesuai dengan kurikulum yang baru. Pengembangan tenaga pendidik ini mulai dari kepala sekolah, guru, dan staff tata usaha yang diberikan tugas masing-masing agar dapat menjalankan perannya pada proses pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Selain itu ketersediaan sarana dan prasana turut mendukung proses belajar mengajar sehingga setiap sekolah perlu untuk meningkatkan semua yang menjadi kebutuhan siswa disekolah.

### 3. Hubungan Antar Organisasi

Pendidikan karakter merupakan salah satu peran lembaga pendidikan untuk membina generasi muda bangsa agar berperilaku baik dan benar sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk menghasilkan generasi muda berkarakter sebagaimana dicita-citakan bersama maka peran pendidikan bagi anak sangat penting sebagai peletak dasar pembentukan diri. Untuk itu setiap organisasi pendidikan tidak mampu untuk berjalan sendiri sehingga membutuhkan koordinasi dengan organisasi yang lain untuk menciptakan perkembangan pendidikan karakter bagi pelajar.

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang adalah terwujudnya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya. Berkarakter memiliki makna sumber daya manusia pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal. Kabupaten Pinrang dikenal sebagai yang menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas sehingga dalam beberapa kegiatan yang bertajuk pendidikan senantiasa membangun kerjasama antar SKPD di Kabupaten Pinrang.

“Untuk tujuan kegiatan pendidikan sebenarnya kami menggandeng beberapa organisasi perangkat daerah, untuk masalah pendidikan karakter itu sendiri kerjasamanya bersama kantor kementerian agama Kabupaten Pinrang. Bentuk kerjasamanya adalah penanaman nilai-nilai kerohanian terhadap siswa melalui pendidikan disekolah. Jadi sekolah di Kabupaten Pinrang itu setiap hari kamis pagi semua membaca ayat alquran sebelum

memulai aktivitas. Ada juga bentuk kegiatan bimbingan seperti kegiatan rohani islam. Nilai-nilai keagamaan memang menjadi salah satu prioritas dalam membangun pendidikan berkarakter disekolah.”(Wawancara dengan Budaya 5 April 2022).

Penanaman nilai keagamaan menjadi penting dalam menciptakan karakter siswa yang berakhlak sesuai dengan ajaran agama. Untuk itu perlu ada kerjasama yang dilakukan dalam mendukung program tersebut. Era globalisasi membuat pelajar jauh dari pendidikan agama sehingga melalui hubungan yang dibangun dinas pendidikan dan kementerian agama menjadi jalan untuk memperkuat karakter dari siswa di sekolah.

Sekolah sebagai organisasi formal memiliki struktur yang memungkinkan sekolah menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukatif yang baik. Masing-masing struktur mempunyai kedudukan tertentu, saling berinteraksi dan menjalankan peranan seperti yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya.

Keterlibatan struktur organisasi disekolah berperan penting dalam membentuk pendidikan karakter siswa di Sekolah Islam Al-Insan Kabupaten Pinrang. Masing-masing struktur bekerja sesuai dengan tupoksinya, sehingga setiap program yang diadakan disekolah selalu menyentuh dengan 18 point dalam membentuk pendidikan karakter.

“Membangun pendidikan karakter disekolah tidak pernah terlepas dari peran seluruh stakeholder di Sd Al Insan ini, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, TU, Guru dan komite sekolah. Seluruh struktur ini saling berkoordinasi untuk menciptakan program pembelajaran sesuai dengan point-point yang tercantum dalam pendidikan karakter. Hal yang paling sederhana misalnya mengharuskan setiap guru untuk mengajak siswa berdoa sebelum belajar, ada juga bentuk kuis yang berisikan akidah-akidah islam. Diharapkan melalui kegiatan ini siswa dapat menjadi karakter yang berakhlak mulia.”(Wawancara dengan Nasir 7 April 2022).

Peran struktural yang ada dalam organisasi sekolah yang saling bersinergi dalam menciptakan program untuk mendukung program pendidikan karakter dapat mempercepat terealisasinya program. Setiap program harus diselaraskan sehingga siswa dapat terbentuk secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan hubungan antar organisasi pada proses implementasi program penguatan pendidikan karakter, dinas pendidikan senantiasa membangun kerjasama dengan SKPD yang memiliki kepentingan yang sama dalam membentuk karakter siswa. Pendidikan karakter yang lebih berkenaan dengan aspek kerohanian membuat beberapa program membutuhkan kerjasama dengan kementerian agama Kabupaten Pinrang untuk memberikan masukan terkait pola pendidikan bagi siswa agar terbentuk ahlak yang mulia. Salah satunya membiasakan siswa untuk membaca al-quran di sekolah setiap hari kamis serta berdoa sebelum belajar.

#### **4. Karakteristik Pelaksana Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku memiliki seperangkat aturan yang mempola jalannya kegiatan kerja. Segala sesuatu berkaitan dengan aktivitas kerja diatur secara legal formal. Setiap tindakan personil diformat oleh aturan organisasi. Personil dalam bertindak tidak bisa seenaknya atau menggunakan caranya sendiri, tetapi harus bertindak mengikuti peraturan organisasi.

Setiap departemen pada dinas pendidikan Kabupaten Pinrang adalah elemen struktur yang memiliki tugas pokok sesuai dengan kualifikasi bidangnya, dan hal itu diatur oleh peraturan organisasi. Dengan demikian dalam melakukan serangkaian kegiatan kerja, yang dimulai dari pemilihan/perencanaan program kerja yang akan ditangani, hingga pelaksanaannya, setiap unit harus berpatokan pada ketetapan peraturan yang ada.

“Mewujudkan pendidikan karakter bagi setiap siswa di Kabupaten Pinrang merupakan tugas dan tanggung jawab dari dinas pendidikan sebagai SKPD pelaksana, untuk itu setiap aparatur di tuntut untuk bekerja sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan dalam menciptakan program-program yang membentuk karakter siswa. Salah satunya setiap enam bulan kita akan mengevaluasi sekolah-sekolah terkait bagaimana proses pelaksanaan pendidikan di wilayah kerjanya. Ada semacam laporan, nanti disitu dapat dilihat dimana kekurangannya, apa yang dibutuhkan. Kebanyakan sarana dan prasana yang masih kurang, sehingga fokus anggaran diarahkan kesana. Inilah wujud nyata yang harus dilakukan dalam mendukung terlaksananya pendidikan karakter di Kabupaten Pinrang.”(Wawancara dengan Budaya 5 April 2022).

Pelaksanaan sebuah program dilakukan berdasarkan petunjuk organisasi termasuk dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan disekolah yang mengarah kepada pencapaian pendidikan karakter. Setiap sekolah dituntut untuk melaporkan setiap kinerja yang menjadi bahan evaluasi sehingga program pendidikan karakter dapat terus ditingkatkan.

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting guna evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan

dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian mengukur kinerja tidak hanya informasi financial tetapi juga informasi non financial.

Setiap sekolah di Kabupaten Pinrang diharuskan menyusun struktur di sekolah agar lebih lengkap sehingga upaya-upaya dalam membangun pendidikan jauh lebih baik. Hal tersebut membuat kepala sekolah sangat memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing struktur yang ada di sekolah agar dapat berfungsi sesuai dengan tanggungjawabnya.

“Kita kepala sekolah juga dituntut untuk memperbaiki kualitas dari struktur kerja yang ada di sekolah. Hal-hal yang diperhatikan seperti menyusun struktur sesuai keahlian, umur dan paling penting disiplin. Setelah itu kita membuat rincian tugas dimana setiap personil yang ada harus bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk guru disini kita menciptakan pola terkait pola pembelajaran yang mengarah kepada pengembangan karakter siswa dan setiap wali kelas perlu membangun jejaring kerjasama dengan orang tua peserta didik.” (Wawancara dengan Mustari 7 April 2022).

Perbaikan kualitas struktur organisasi di sekolah mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Melalui penetapan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dapat mengarahkan pengembangan pendidikan karakter bagi siswa berjalan dengan baik.

Keluarga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Manusia melakukan aktivitas belajar pertama kali pada lingkungan keluarga. Segala sesuatu yang ditanamkan dari kecil oleh keluarga seseorang akan sangat membekas dan mempengaruhi hidupnya. Peran orang tua berkisar pada kegiatan pemeliharaan, pembimbingan, dan

pendidikan anak baik segi rohani maupun segi jasmani. Orang tua sebagai salah satu yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu untuk menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Keterlibatan orang tua dalam ikut membimbing anak pada proses pengembangan pendidikan karakter merupakan langkah yang tepat bagi orang tua untuk melihat perkembangan belajar setiap siswa. Hubungan antara guru dan orang tua menjadikan perkembangan pendidikan anak akan lebih baik karena selain di sekolah anak juga ditanamkan manajemen waktu di rumah.

“Selalu kita di panggil oleh guru untuk disampaikan hasil belajar anak di sekolah termasuk itu terkait pendidikan kurikulum baru juga sudah disosialisasikan di sekolah. Makanya setiap ada pembagian raport itu kita orang tua yang harus datang biar dapat ditau bagaimana perkembangan pembelajaran anak.” (Wawancara dengan Rahma 7 April 2022).

Keterlibatan orang tua untuk ikut serta mengawasi perkembangan pendidikan anak di sekolah merupakan fungsi dari struktur birokrasi di sekolah. Pola pengembangan pendidikan karakter memang diarahkan tidak hanya terjadi di sekolah namun juga setiap orang tua di rumah harus senantiasa menanamkan kedisiplinan bagi anak jika berada di rumah.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait karakteristik pelaksana pada proses implementasi program penguatan pendidikan karakter, pada proses pelaksanaan program pendidikan karakter bagi siswa setiap aparaturnya telah dibekali petunjuk teknis terkait pola

penyelenggaraan pendidikan karakter. Setiap devisi yang ada pada struktur kerja sudah dilengkapi fungsi dan wewenang masing-masing. Begitupun disekolah perbaikan komposisi pelaksana pendidikan disekolah telah diperbarui sehingga dapat mengikuti kurikulum baru yang mengarah kepada pembentukan pendidikan karakter bagi siswa.

#### 5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Bagaimanapun, hingga hari ini masih banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SD sekalipun. Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki gedung yang representatif atau tak memiliki ruang belajar sama sekali.

Dinas pendidikan Kabupaten Pinrang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat wajib belajar 9 tahun mengharuskan setiap anak di Kabupaten Pinrang untuk bersekolah. Melalui program bantuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah setiap orang tua yang tidak mampu untuk melaporkannya kepada dinas pendidikan atau pemerintah kecamatan setempat.

“Salah satu program strategis dari bupati itu adalah bantuan bagi pelajar, jadi tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya di Kabupaten Pinrang ini. Bagi orang tua yang memiliki masalah perekonomian tentu tinggal melaporkan kepada kami melalui rekomendasi pemerintah kecamatan untuk segera didata. Jadi harus sekolah, pemerintah sudah mendukung itu melalui

program-program bantuan. Apa lagi masa covid sekarang itu banyak sekali bantuan pendidikan.”(Wawancara dengan Budaya 5 April 2022).

Kebijakan wajib belajar 9 tahun mengharuskan optimalisasi bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah lebih giat dilakukan. Setiap kepala daerah yang ada menempatkan bantuan pendidikan sebagai salah satu program strategis. Hal ini tentu perlu didukung melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat.

Tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan politik yang sedang memegang peran strategis dalam mengelola pemerintahan. Lihat saja, berapa kali perubahan kebijakan pengembangan kurikulum. Setiap terjadi pergantian menteri selalu diikuti dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Satu kebijakan pendidikan yang masih disosialisasikan kepada penyelenggara pendidikan dibawahnya belum tuntas dan belum dipahami, sudah ada kebijakan baru yang mau tidak mau para pengelola pendidikan harus sabar mengikuti selera pemegang kekuasaan politik. Padahal Undang-Undang Sisdiknas yang ada belum dilakukan perubahan.

Dinamika politik juga berdampak terhadap jenjang pendidikan di Kabupaten Pinrang. Bagi sekolah perubahan regulasi yang terus terjadi seiring pergantian kepala daerah menjadikan beberapa perubahan signifikan juga terjadi disekolah. Termasuk reposisi beberapa struktural yang ada disekolah karena perbedaan pandangan politik.

“Masih menjadi kebiasaan di Pinrang ini kalau berbeda pilihan akan berdampak kepada jabatan seseorang disekolah. Tentu ini akan merubah sistem yang sudah dibangun seiring dengan pergantian kepemimpinan. Misalnya saja ada beberapa kepala sekolah yang

dipindah tugaskan karena berbeda pandangan politik pada saat pilkada, sementara program sudah dilaksanakan, itu kan mengganggu terkait apa yang sudah dikerjakan. Termasuk dinas-dinas terkait juga banyak yang direposisi. Semoga kejadian-kejadian seperti itu tidak ada lagi di Pinrang, kalau bicara pension atau karena kurang optimal dalam memimpin itu boleh saja, tapi kalau persoalan beda pandangan politik saya pikir itu hal yang lain.” (Wawancara dengan Samsiah 7 April 2022).

Bukan hal asing lagi perbedaan pandangan politik dapat mempengaruhi posisi seseorang dalam suatu jabatan. Kondisi tersebut tentu menjadi sebuah permasalahan khususnya di Kabupaten Pinrang, perbedaan pandangan politik membuat manajemen pengelolaan sekolah menjadi terganggu bahkan cenderung ikut mempengaruhi kondisi sistem belajar mengajar disekolah.

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju remaja dan ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan dengan cara mencoba hal-hal yang baru dikenalnya walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Bentuk-bentuk kenakalan remaja semakin beragam dan semakin meningkat intensitasnya seperti tawuran antar sekolah, kelompok geng pelajar, penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, pelajar hamil di luar nikah.

Kenakalan remaja usia 12-18 tahun menjadi permasalahan sosial di

Kabupaten Pinrang yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan anak disekolah. Melalui pendidikan karakter orang tua berharap anak mereka dapat tumbuh tanpa adanya masalah seperti yang banyak terjadi di lingkungannya. Terlebih di era teknologi informasi seperti sekarang ini setiap anak semakin susah dikendalikan.

“Banyak sekali ketakutan bagi orang tua terlebih usia sekolah seperti ini nakal-nakal semua. Banyak itu anak sd didapat biasa hisap lem bahkan minum-minuman keras. Sehingga memang orang tua melalui pendidikan karakter ini diharapkan anak dapat tumbuh berkembang kearah yang lebih baik. Bagi pemerintah juga untuk senantiasa mengendalikan situasi sekarang, memberikan sanksi bagi pelaku-pelaku kriminal yang melibatkan anak sekolah. Itu juga game-game judi banyak rusaki anak-anak di Pinrang.” (Wawancara dengan Lina 7 April 2022).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat jika tidak dapat dikendalikan dengan baik akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Banyak hal-hal yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh anak usia sekolah menjadi tontonan sehari-hari. Sehingga melalui pendidikan karakter dan peran orang tua dirumah diharapkan anak dapat tumbuh berkembang dan tidak terlibat dalam kenakalan remaja.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada proses implementasi program penguatan pendidikan karakter, dimana kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat melalui berbagai program bantuan pendidikan menjadi wadah bagi masyarakat untuk terus menyekolahkan anaknya. Selanjutnya pemerintah harus senantiasa mengendalikan situasi di daerahnya agar tidak terus terjadi permasalahan sosial seperti kenakalan

remaja. Pemerintah juga dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengeluarkan keputusan termasuk tidak mencampuradukan perbedaan pandangan politik dengan jabatan yang diemban seseorang.

## C. Pembahasan

### 1. Standar dan ukuran kebijakan

Kebijakan pendidikan harus menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diubah atau diganti sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhan. Kebijakan pendidikan dirumuskan melalui proses politik untuk menentukan rencana-rencana atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan. Menentukan rencana-rencana kebijakan pendidikan harus juga mengkaitkannya dengan anggaran pendidikan. Sebab anggaran pendidikan sangat menentukan tingkat efisien dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dalam melihat standar dan ukuran kebijakan pada proses implementasi program penguatan pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa pada proses pengembangan karakter. Melalui beberapa kegiatan yang dilakukan disekolah menjadikan siswa lebih kreatif, mandiri, dapat bersosialisasi dengan baik, disiplin. Setiap sekolah diharuskan membukakan ruang bagi setiap pelajar untuk mengembangkan kreatifitasnya melalui kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Sehingga

melalui kegiatan tersebut setiap guru dapat mengenali dan meningkatkan potensi dari setiap masing-masing siswa.

Dari hasil penelitian dan teori yang dikemukakan dapat dilihat bahwa program pendidikan karakter di Kabupaten Pinrang merupakan hasil kebijakan pendidikan nasional sebagai langkah dalam membentuk karakter siswa bukan hanya dari segi afektif dan psikomotorik namun juga kepada pengembangan karakter siswa sesuai dengan prinsip pancasila.

## 2. Sumber Daya

Cara yang dapat ditempuh dalam manajemen personal di sekolah adalah dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan yang terarah dan terus menerus agar personal yang ada dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Pembinaan dan pemberdayaan personal mencakup pembinaan akademis atau profesionalnya, karier dan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil observasi penulis lapangan terkait sumber daya pada proses implementasi program penguatan pendidikan karakter dimana setiap tenaga pendidik disekolah di berikan pelatihan kompetensi agar mampu melaksanakan pola pendidikan karakter sesuai dengan kurikulum yang baru. Pengembangan tenaga pendidik ini mulai dari kepala sekolah, guru, dan staff tata usaha yang diberikan tugas masing-masing agar dapat menjalankan perannya pada proses pelaksanaan pendidikan disekolah. Selain itu ketersediaan sarana dan prasana turut mendukung proses belajar

mengajar sehingga setiap sekolah perlu untuk meningkatkan semua yang menjadi kebutuhan siswa disekolah.

Dari hasil penelitian dan teori yang dikemukakan dapat dilihat bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di Kabupaten Pinrang didukung oleh ketersediaan sumber daya mulai dari manajemen kurikulum, kelengkapan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas guru melalui pelatihan-pelatihan untuk lebih mengembangkan metode pembelajaran yang dilakukan guru terhadap siswa dalam mendukung program pendidikan karakter.

### 3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan keniscayaan antara organisasi dan komunikasi dapat dipahami berdasarkan pandangan operasional maupun konseptual. Pandangan operasional terkait dengan prinsip-prinsip kerja organisasi, termasuk kerja organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi, kewenangan manajemen dalam memengaruhi perilaku karyawan melalui koordinasi untuk pengintegrasian dan pengarahan kegiatan-kegiatan internal organisasi dan penyesuaian kegiatan-kegiatan eksternal agar adaptif dengan lingkungan demi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan hubungan antar organisasi pada proses implementasi program penguatan pendidikan karakter, dinas pendidikan senantiasa membangun kerjasama dengan SKPD yang memiliki kepentingan yang sama dalam membentuk karakter siswa. Pendidikan karakter yang lebih berkenaan dengan aspek kerohanian

membuat beberapa program membutuhkan kerjasama dengan kementrian agama Kabupaten Pinrang untuk memberikan masukan terkait pola pendidikan bagi siswa agar terbentuk ahlak yang mulia. Salah satunya membiasakan siswa untuk membaca al-quran di sekolah setiap hari kamis serta berdoa sebelum belajar.

Dari hasil penelitian dan teori yang menjadi rujukan hubungan antar organisasi dalam rangka mendukung program pendidikan karakter di Kabupaten Pinrang pada dasarnya untuk pencapaian tujuan dari pelaksanaan pendidikan karakter. Dinas pendidikan merupakan organisasi pemerintah yang terstruktur dengan baik serta mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan tanggungjawab. Pelaksanaan pendidikan karakter juga membutuhkan kerjasama antar organisasi termasuk dari segi penanaman ahlak mulia dari seorang siswa melalui pendekatan agama.

#### **4. Karakteristik Pelaksana**

Karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Birokrasi merupakan instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi, dimana birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait karakteristik

pelaksana pada proses implementasi program penguatan pendidikan karakter, pada proses pelaksanaan program pendidikan karakter bagi siswa setiap aparatur pelaksana telah dibekali petunjuk teknis terkait pola penyelenggaraan pendidikan karakter. Setiap devisi yang ada pada struktur kerja sudah dilengkapi fungsi dan wewenang masing-masing. Begitupun disekolah perbaikan komposisi pelaksana pendidikan disekolah telah diperbarui sehingga dapat mengikuti kurikulum baru yang mengarah kepada pembentukan pendidikan karakter bagi siswa.

Dari hasil penelitian dan teori yang dibangun aparatur birokrasi pada ruang lingkup Dinas Pendidikan kabupaten Pinrang dalam melaksanakan kebijakan terkait pembangunan pendidikan karakter telah memiliki pedoman dan petunjuk teknis terkait arah dan proses pelaksanaan program, sehingga dapat menjadi acuan bagi para aparatur untuk terus mengembangkan pendidikan karakter disekolah.

##### **5. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik**

Pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada proses implementasi program penguatan pendidikan karakter, dimana kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat melalui berbagai program bantuan

pendidikan menjadi wadah bagi masyarakat untuk terus menyekolahkan anaknya. Selanjutnya pemerintah harus senantiasa mengendalikan situasi di daerahnya agar tidak terus terjadi permasalahan sosial seperti kenakalan remaja. Pemerintah juga dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengeluarkan keputusan termasuk tidak mencampuradukan perbedaan pandangan politik dengan jabatan yang diemban seseorang.

Dari hasil penelitian dan teori yang menjadi rujukan dalam upaya peningkatan pendidikan karakter bagi sekolah di Kabupaten Pinrang mendapat dukungan dari masyarakat, selain itu program-program bantuan pemerintah daerah juga mengarah kepada memecahkan masalah perekonomian masyarakat sehingga tidak menjadi penghambat bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Pinrang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar dan Ukuran Kebijakan penguatan program pendidikan karakter membuat siswa lebih kreatif, mandiri, dapat bersosialisasi dengan baik dan disiplin.
2. Sumber daya, untuk tercapainya tujuan program pendidikan karakter di dukung oleh kapasitas tenaga pengajar yang mempunyai melalui pemberian pelatihan dan bimbingan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di setiap sekolah.
3. Hubungan antar organisasi, dalam mendukung program pendidikan karakter pelaksanaan program turut melibatkan SKPD diluar dinas pendidikan yang saling bersinergi dalam menciptakan kegiatan yang mendukung implementasi pendidikan karakter.
4. Karakteristik pelaksana, untuk pelaksanaan program pendidikan karakter setiap struktur yang ada telah dibekali petunjuk berupa standar operasional prosedur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

5. Lingkungan, sosial, ekonomi dan politik turut mempengaruhi proses pelaksanaan pendidikan karakter

## B. Saran

Adapun saran dan rekomendasi penulis terkait penelitian tentang Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Pinrang yaitu:

1. Agar program pendidikan karakter berhasil di implementasikan oleh satuan pendidikan pemerintah daerah harus berkontribusi penuh melatih dan mempersiapkan guru termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
2. Terus berupaya membangun komunikasi dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (tokoh masyarakat, pengawas sekolah dan pemerhati pendidikan) untuk terus berupaya mencari dan mengembangkan pendidikan karakter guna memajukan sekolah tersebut.
3. Kepala sekolah dan guru harus senantiasa mencontohkan perilaku yang baik sebagai cerminan sehingga menjadi panutan dan teladan bagi siswa.
4. Senantiasa melakukan sosialisasi terhadap orang tua siswa dengan menghadirkan ahli yang kompeten dalam bidang pendidikan karakter. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan karakter, melakukan gerakan kolektif dan penancangan pendidikan karakter untuk semua.

5. Di sisi lain, pihak sekolah juga diharapkan ikut mendukung dengan aturan atau tata tertib sekolah yang bisa memberikan hasil yang lebih signifikan bagi pelaksanaan pendidikan karakter. Bagi pengambil kebijakan, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, harus selalu konsisten dalam penerapan pendidikan karakter. Juga, diharapkan lebih memperhatikan guru-guru sebagai ujung tombak pendidikan karakter, baik dalam hal penghargaan maupun kesejahteraannya.



### DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, R. F. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Aliran Sungai Cikembulan Kabupaten Pangandaran. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(1).
- Agung Prasetyo, D., & Muthali'in, A. (2019). *Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Melalui Program Adiwiyata (Studi Kasus Pada Siswa SMP Negeri 9 Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Al Musafiri, M. R. (2017). Peran kearifan lokal bagi pengembangan pendidikan karakter pada sekolah menengah atas. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 8(1), 1–19.
- Amjah, A., Agustino, L., & Arenawati, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1).
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. CV Pustaka Setia.
- FIO, E. K. O. Y. (2021). Implementasi Dalam Kegiatan Tank Cleaning Sebagai Upaya Persiapan Ruang Muat Di Mt. Rugun Lata. *Karya Tulis*.
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 25–37.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26.
- Jumiyem, J. (2021). Urgensi Urgensi Penguatan Pendidikan karakter di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Inovasi Gerabah Si Babe (Studi Kasus di SD negeri Sidorejo. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Pendidikan*, 2(1), 748–768.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Putra, S. W., Abubakar, M., & Abubakar, R. (2021). Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020. *Jurnal*

*Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 11–19.

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Siadari, B. (2018). *Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Peserta Didik Pada Pokok Materi Kubus Dan Balok Di Kelas VIII SMP Negeri 2 Raya*.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2, 1–11. <https://doi.org/10.29240/jf.v4i2.1092>
- Susanto, A., & Sujianto, S. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-qur'an Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar*. Riau University.
- Suwito, A. (2012). Integrasi Nilai Pendidikan Karakter ke dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Melalui RPP. *CIVIS*, 2(2).
- Wadud, F. M. (2019). *Implementasi Pendidikan Karakter Pada Kurikulum 2013 Di Sma Negeri 11 Pinrang, Sulawesi Selatan*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- WAHDANIYAH, N. (n.d.). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19*.
- WAHIB, A. (2020). *Optimalisasi Pencegahan Pencemaran Minyak Dalam Implementasi Annex 1 Marpol 1973/1978 Di Mt. Enduro Pt. Pertamina (Persero)*. Karya Tulis.

DOKUMENTASI



nomor : 0333/ESP/AG.VIII/III/1443/H/2022/M  
jumlah : 1 (satu) Eksemplar  
tujuan : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) UinSM  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data  
dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat  
memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Iis Suedi

Stambuk : 105641103418

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang

Judul Skripsi : *"Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter  
Melalui Kegiatan Pembiasaan dalam Peningkatan Mutu  
Sekolah di Kabupaten Pinrang."*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya  
yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 05 Maret 2022

Dekan,  
Uj. Wakil Dekan I



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM. 992 797



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

592/05/C.4-VIII/III/43/2022

04 Sya'ban 1443 H

1 (satu) Rangkap Proposal

07 March 2022 M

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Pinrang

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Pinrang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0333/FSP/A.6-VII/III/1443H/2022M tanggal 5 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : IIS SUEDI  
No. Stambuk : 105641103418  
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan dalam Peningkatan Mutu Sekolah di Kabupaten Pinrang"

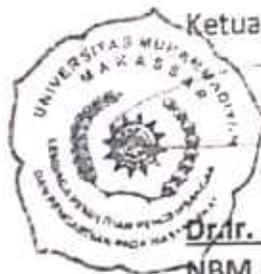
Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Maret 2021 s/d 10 Mei 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



# PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang91212

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503/0117/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2022

Tentang

### REKOMENDASI PENELITIAN

**Menimbang** bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-03-2022 atas nama IIS SUEDI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan selang dapat diberikan Rekomendasi Penelitian

**Mengingat**

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan**

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0240/R/T.Teknis/DPMPTSP/03/2022, tanggal 28-03-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0117/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2022, tanggal 28-03-2022

**Menetapkan**

**KESATU**

Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada

1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2. Alamat Lembaga : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
3. Nama Peneliti : IIS SUEDI
4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN PEMBHASAAN DALAM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DI KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN STAF
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawate

**KEDUA**

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 28-09-2022

**KETIGA**

Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

**ANDI MIRANI, AP., M.Si**

NIP. 197406031993112001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**ZONA  
HIJAU**



**OMBUDSMAN  
REPUBLIC INDONESIA**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Iis Suedi  
NIM : 105641103418  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 9 Mei 2022

Mengetahui

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursinah, S.Hum., M.I.P.  
NBM. 964 591

## RIWAYAT HIDUP



**Iis Suedi**, Lahir pada tanggal 03 Februari 1999, di Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis Merupakan Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Edi Sabang dan Sufiani Kunnu. Penulis pertama kali masuk pendidikan di Taman satu Atap SD Inpres Karawan pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN Inpres Karawa kemudian tamat pada tahun 2011.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lembang dan pindah ke SMPN 1 Pinrang kemudian tamat pada tahun 2014. Setelah tamat, Penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Pinrang dan tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2022 penulis mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan judul Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Kabupaten Pinrang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.